LAPORAN
Forum Konsultasi Publik (FKP)

2024

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KECAMATAN PAMEKASAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, bersama ini kami telah dapat menyusun Laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pamekasan.

Dengan terlaksananya FKP Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pamekasan, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya, dalam rangka mendorong dan mewujudkan tujuan Pembangunan di Kecamatan yang selaras dengan Peningkatan Pelayanan Administrasi yang optimal dan sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Pamekasan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua.

Pamekasan, 01 November 2024

CAMAT PAMEKASAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAMEKASAN

Dr. RAHMAT KURNIADI SUROSO,S.Sos., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19760502 199412 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tujuan dan Manfaat 2
D. Ruang Lingkup 3
METODOLOGI PELAKSANAAN 5
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 5
B. Penyelenggara dan Peserta FKP 5
C. Metode Pelaksanaan FKP 5
D. Susunan Acara FKP 6
HASIL PELAKSANAAN FKP 7
A. Identifikasi Masalah 7
B. Analisis 7
C. Rencana Aksi 8
PENUTUP 9
LAMPIRAN
Berita Acara
Surat Undangan
Salinan Daftar Hadir
Dokumentasi Kegiatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021, Kecamatan Pamekasan merupakan unsur pelaksana kewilayahan yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan alam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta koordinasi kesatuan bangsa masyarakat Kabupaten Pamekasan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kecamatan Pamekasan mengemban agenda kewajiban penting, hal ini karena pelayanan publik berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayahnya, sehingga seluruh abdi negara diwajibkan untuk menyediakan layanan prima.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dikatakan prima jika dapat memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta sesuai dengan standar pelayanan. Dalam penerapannya sering kali muncul permasalahan seperti perbedaan persepsi, perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan praktek sehari hari, dan perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah. Sehingga, sebagai penyelenggara pelayanan perlu adanya perlibatan dan ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Kecamatan Pamekasan.

B. Dasar Hukum

1. UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
2. UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publikdi Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:
   a) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
   b) Menyamakan persepsi Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pamekasan terkait komponen dan pemenuhan Standar Pelayanan yang sesuai dengan hukum perundang-undangan.
   c) Menyediakan ruang untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pelayanan kepada Pemerintah Desa da Kelurahan se-Kecamatan Pamekasan.

2. Manfaat dilaksanakannya Forum konsultasi publik adalah sebagai berikut:
   a) Secara Umum

      Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
   b) Penyelenggara Pelayanan
      1) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
      2) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
      3) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
      4) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
      5) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
      6) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
   c) Publik
      1) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
      2) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
      3) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
      4) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
      5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Ruang Lingkup

Tema yang diangkat dalam Forum Konsultasi Publik adalah "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pamekasan", sehingga pembahasan dan ruang lingkup permasalahan yang dibahas berkaitan dengan indikator dan unsur yang mendukung dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pamekasan, termasuk penyamaan persepsi Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat antar Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pamekasan.

Indikator dan unsur yang perlu diperhatikan dan didiskusikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari komponen Standar Pelayanan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2009, hak masyarakat, kewajiban penyelenggara, dokumen pelayanan publik dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM).

Permasalahan atau kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu adalah tentang kepuasan masyarakat, anggaran dan persepsi negatif masyarakat, isu percaloan dan kendala teknis lainnya. Sehingga dengan memperhatikan indikator dan pemilihan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah diharapkan dapat menghilangkan anggapan negatif masyarakat tentang wajah pelayanan publik.

METODOLOGI PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024

Tempat : Balai Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan

B. Penyelenggara dan Peserta FKP

1. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh Camat Pamekasan, tentang pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan publik serta pemenuhan standar pelayanan yang harus dipenuhi demi pelaksanaan pelayanan publik yang baik.
2. Pemaparan dan sesi tanya jawab dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pamekasan, terkait seputar pelayanan publik, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan Survey Kepuasan Publik dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa/Kelurahan baik permasalahan persepsi masyarakat (eksternal) dan permasalahan teknik (internal) yang dihadapi.
3. Kesimpulan Forum Konsultasi Publik disampaikan oleh Camat Pamekasan, yaitu semua aspek yang mendukung pelayanan harus dipenuhi terutama terkait format pelayanan yang sudah dibuatkan oleh Kecamatan Pamekasan. Desa dan Kelurahan khususnya Kecamatan agar mampu dalam mengembangkan dan mempertahankan Inovasi Pelayanan Publik demi kelancaran proses pelayanan publik.
4. Peserta yang hadir dalan Forum Konsultasi Publik ini terdiri dari:
   a) Camat Pamekasan
   b) Sekretaris Camat
   c) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   d) Pejabat Struktural Kecamatan Pamekasan
   e) Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Pamekasan
   f) Staf Pemerintah dan Pelayanan Publik

C. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Metode pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Kecamatan Pamekasan adalah pemaparan dan diskusi. Pemaparan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pamekasan dimulai pada 30 menit pertama. Kemudian dilanjutkan dengan komunikasi dua arah untuk menyerap aspirasi dari peserta Forum Konsultasi Publik dan ditutup dengan penyampaian kesimpulan.

D. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Susunan acara Forum Konsultasi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pamekasan, terdiri dari:

1. Pembukaan
2. Sambutan Camat Pamekasan
3. Pemaparan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Diskusi/Tanya Jawab
5. Penutup

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

A. Indentifikasi Masalah

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik untuk pihak rentan dan disabilitas di setiap kelurahan dan desa Kecamatan Pamekasan belum terpenuhi dengan baik.
2. Pemerintah Desa dan Kelurahan kebanyakan belum memenuhi Standar Pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk masalah format pelayanan yang berlaku pada saat ini.
3. Selurah Desa dan Sebagian Kelurahan di Kecamatan Pamekasan belum membuat kebijakan pelayanan seperti maklumat pelayanan, Standar Pelayanan, SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dan SOP (Standar Operasional Prosedur).
4. Optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan inovasi pelayana publik.

B. Analisis

1. Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting pendukung pelaksanaan pelayanan publik terutama bagi pemohon dari kelompok rentan dan disabilitas.
2. Standar Pelayanan disusun berdasarkan regulasi yang ada. Seiiring berjalannya waktu, regulasi terus berubah. Disamping itu, perlu adanya keseragaman antar desa dan kelurahan dalam menyusun Standar Pelayanan sehingga tidak terjadi mal-administrasi terutama dalam menyamakan format penulisan dari sebuah pelayanan.
3. Kebijakan pelayanan seperti maklumat pelayanan, standar pelayanan, SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan dokumen yang wajib dibuat dalam setiap instansi penyelenggara pelayanan publik terutama SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yang pada dasarnya digunakan untuk mengukur kepuasan publik terhadap berbagai indikator pelayanan publik yang telah ditetapkan di dalam PermenPAN-RB untuk kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pelayanan publik mendatang.
4. Inovasi merupakan program yang diciptakan untuk mendukung terlaksananya pelayanan publik, kurangnya penyebaran informasi dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program pemerintah terhadap inovasi dapat menurunkan nilai pemanfaatan dari inovasi itu sendiri.

C. Rencana Aksi

1. Melakukan pengendalian anggaran untuk merealisasikan sarana dan prasarana, agar pelayanan pulik terlaksana dengan baik dan optimal.
2. Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan dan format penulisan pelayanan agar terealisasi keseragaman standar pelayanan.
3. Melakukan sosialisasi terkait regulasi pembuatan maklumat pelayanan, standar pelayanan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) serta metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
4. Optimalisasi penggunaan sosial media untuk menyebarkan dan mempromosikan inovasi pelayanan publik, agar masyarakat dapat lebih mengenal dan memanfaatkan inovasi pelayanan publik yang ada.

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pamekasan tahun 2024. Identifikasi permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan Forum Konsultasi Publik FKP dapat digunakan sebagai evaluasi dan Rencana tindak lanjut yang akan diambil pada masa yang akan mendatang untuk mendukung kemajuan pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut yang telah dirumuskan bersama, tentunya memerlukan waktu dan proses dalam penerapannya, sehingga dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder terkait.

Kemudian kami sampaikan harapan, permohonan, kritik dan saran sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan langkah-langkah ke depan demi mencapai hasil yang lebih baik dan bermanfaat kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Pamekasan, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dan Pelayanan Publik di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Akhirnya kepada semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Pamekasan, 01 November 2024

CAMAT PAMEKASAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAMEKASAN

Dr. RAHMAT KURNIADI SUROSO,S.Sos., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19760502 199412 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAMEKASAN
Jl. P. Trunojoyo No: 369 Kode Pos: 69317
Telp : (0324) 321517 Email: kec.pamekasan@pamekasankab.go.id Website: http://satekecap.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024

Pada Hari Rabu, 23 Oktober 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Wantu Penyelesaian
1	Sarana dan prasarana pelayanan publik untuk pihak rentan dan disabilitas di Kecamatan Pamekasan belum terpenuhi dengan baik	Pengendalian anggaran dan perencanaan	1-6 bulan
2	Pemerintah Desa dan Kelurahan kebanyakan belum memenuhi Standar Pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk masalah format pelayanan yang berlaku pada saat ini	Sosialisasi standar pelayanan agar tidak terjadi mal-administrasi terutama menyamakan format pelayanan yang berlaku pada saat ini	1-3 bulan
3	Selurah Desa dan Sebagian Kelurahan di Kecamatan Pamekasan belum membuat kebijakan pelayanan seperti maklumat pelayanan, Standar Pelayanan, SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dan SOP (Standar Operasional Prosedur)	sosialisasi terkait regulasi pembuatan maklumat pelayanan, standar pelayanan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) serta metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	1-3 bulan
4	Optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan inovasi pelayanan publik	Optimalisasi penggunaan sosial media untuk menyebarkan dan mempromosikan inovasi pelayanan publik, agar masyarakat dapat lebih mengenal dan memanfaatkan inovasi pelayanan publik yang ada	1-6 bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima indentifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Pamekasan, 23 Oktober 2024

No.	Nama	No. Handphone	Jenis Kelamin	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Dr. Rahmat Kurniadi Suroso, S.Sos. M.Si	081330550406	L	Kecamatan Pamekasan	
2	Hasyim Abdurrahim, S.STP., M.Si	081910003452	L	Pejabat Struktural Kecamatan Pamekasan	
3	Ali Oesman, S.Sos. MM	085236281268	L	Forum Lurah	
4	Drs. Moh. Fandi	087800048080	L	Ikatan Kepala Desa	

*) Penandatanganan adalah perwakilan dari masing-masing peserta FKP dan wajib mencamtumkan No. Handphone

Camat Pamekasan

Dr. RAHMAT KURNIADI SUROSO,S.Sos., M.Si
NIP. 19760502 199412 1 002

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kecamatan Pamekasan

SUPARMAN, SE.
NIP. 19681110 199302 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAMEKASAN
Jl. P. Trunojoyo No: 369 Kode Pos: 69317
Telp : (0324) 321517 Email: kec.pamekasan@pamekasankab.go.id Website: http://satekecap.id

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2023

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasanyang telah di tandatangani pada 31 Oktober 2023. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

No.	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1	Sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan Pamekasan belum terpenuhi dengan baik	Pengendalian anggaran dan perencanaan	Perencanaan anggara di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Waktu Pelaksanan: Triwulan I Tahun 2024	
2	Pemerintah Desa dan Kelurahan Sebagian besar belum memenuhi Standar Pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sosialisasi standar pelayanan agar tidak terjadi mal-administrasi	Sosialisasi standar pelayanan dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan Waktu Pelaksanan: Triwulan I Tahun 2024	
3	Selurah Desa dan Sebagian Kelurahan di Kecamatan Pamekasan belum membuat kebijakan pelayanan seperti maklumat pelayanan, Standar Pelayanan, SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dan SOP (Standar Operasional Prosedur)	Sosialisasi terkait regulasi pembuatan maklumat pelayanan, standar pelayanan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) serta metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi terkait regulasi pembuatan maklumat pelayanan, standar pelayanan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) serta metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Waktu Pelaksanan: Triwulan I dan II Tahun 2024	
4	Optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan inovasi pelayanan publik	Optimalisasi penggunaan sosial media untuk menyebarkan dan mempromosikan inovasi pelayanan	Optimalisasi penggunaan sosial media dan sosialisasi kepada masyarakat terkait inovasi	

		publik, agar masyarakat dapat lebih mengenal dan memanfaatkan inovasi pelayanan publik yang ada	pelayanan publik Kecamatan Pamekasan Waktu Pelaksanan: Kondisional	

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Pamekasan, 31 Oktober 2023

Camat Pamekasan

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN PAMEKASAN

Dr. RAHMAT KURNIADI SUROSO,S.Sos., M.Si
NIP. 19760502 199412 1 002

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kecamatan Pamekasan

SUPARMAN, SE.
NIP. 19681110 199302 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAMEKASAN
Jl. P. Trunojoyo No: 369 Kode Pos: 69317
Telp : (0324) 321517 Email: kec.pamekasan@pamekasankab.go.id Website: http://satekecap.id

Pamekasan, 18 Oktober 2024

Nomor : 005/437/432.504/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

K e p a d a
Yth. Sdr. Lurah/Kepala Desa
Kecamatan Pamekasan
di –
P A M E K A S A N

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada pertemuan yang akan dilaksanakan nanti pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	23 Oktober 2024
Jam	:	08.00 WIB - selesai
Tempat	:	Balai Kelurahan Kolpajung
Acara	:	Forum Konsultasi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pamekasan Tahun 2024

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

CAMAT PAMEKASAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAMEKASAN

Dr. RAHMAT KURNIADI SUROSO,S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197605021994121002

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAMEKASAN
Jl. P. Trunojoyo No: 369 Kode Pos: 69317
Telp : (0324) 321517 Email: kec.pamekasan@pamekasankab.go.id Website: http://satekecap.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2024
Pukul : 08.00 WIB-selesai
Tempat : Balai Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan
Acara : Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pamekasan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rahmat Ahmadi S.	Camat	1.
2.	Hasyim AK.	Sekcam	2.
3.	Iqbal fathani	Staf	3.
4.	Said afandy	Kasi Trantib	4.
5.	M. ALI RIFFO	Lurah Kangayan	5.
6.	Aminullah	Kades Teja Timur	6.
7.	TRI NOFFA VW	Kasi Kesbang	7.
8.	ALI OSMAN	L. KOWEL	8.
9.	Abdillah Sehyar	Kades Jalmak	9.
10.	Solik Afandi	Carik	10.
11.	BAHRUN SALEH	Kasubbag PUK	11.
12.	Syaref Ru	Kasi PMD	12.
13.	MUHAMMAD JAKI	KADES MYANG	13.
14.	R. SEPRIANGGI	L. Bugin	14.
15.	BPBD	Pthan	15.
16.	ANGGA YUDIANTO	KEJAKSAAN	16.
17.	Omar	L. Barurambat Kota	17.
18.	Supardan	Kasi Pemberdayaan	18.
19.	SUBARSONO.	LURAH DCC.	19.
20.	Ika Yuli P	Kasubbag Keuangan	20.
21.	Richa P.A.	Kasi Binmas Pendes	21.
22.	Drs. MOH. FANDI	KADES PANEMPAN	22.

23.	Apri Dwi Deden K.	Kades Teja Barat	23.
24.	Kusmawardi	Kepala Desa Bettet	24.
25.	ALIMUDDIN	KADES CADEM	25.
26.	Mohammad Sarie	toronan	26.
27.	WAT ZAHRI	Nyalabu Laok	27.
28.	Ach. Zainul H.	Lurah Patafon	28.
29.	Andi Alamsa a.	Lurah Ga.	29.
30.	Arafah	Lurah Kebonagung	30.
31.	Dyi Dwi Rahayu	Staf Pelayanan	31.
32.	Nonyta Aryfigana	Staf Pelayanan	32.
33.	Hafni	Staf kecamatan	33.
34.	ERICK PRATAMA	STAF PELAYANAN	34.
35.	erwin abdillah	staf pelayanan	35.

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAMEKASAN

CAMAT PAMEKASAN

Dr. RAHMAT KURNIADI SUROSO,S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197605021994121002

DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK
KECAMATAN PAMEKASAN
TAHUN 2024



